



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 05 November 2012

Halaman: 9

KELUARGA PEMEGANG KMS DIMINTA LAPOR

Santunan Kematian Siap Dicairkan

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos-nakertrans) Kota Yogyakarta kembali menerima permohonan santunan kematian dari warga Kota Yogyakarta yang keluarganya meninggal dunia. Namun permohonan tersebut hanya diperuntukkan bagi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Muhamad Sarjono mengatakan, besaran santunan kematian masih sama seperti tahun sebelumnya yakni Rp 600 ribu per jiwa. Hanya saja, tahun ini diberikan bagi keluarga pemegang KMS. Hal ini merujuk pada Permendagri 39/2012 sebagai perubahan atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Penyaluran Dana Hibah dan

Bantuan Sosial. "Penyaluran santunan sempat terhambat karena aturan Permendagri itu. Tetapi sekarang dapat dicairkan kembali khusus bagi warga dengan risiko sosial," terangnya, Minggu (4/11).

Dari daftar permohonan sejak Januari - Mei 2012 terdapat 995 berkas. Akan tetapi hanya 23 persen atau 226 berkas yang dapat diproses. Sisanya tidak bisa diproses karena bukan pe-

megang KMS. Total anggaran yang disiapkan untuk pengucuran program sosial tersebut sekitar Rp 1 miliar.

Sarjono menambahkan, santunan tersebut akan dicurahkan pada bulan ini setelah peraturan walikota (perwal) disahkan. "Warga pemegang KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia pada kurun waktu sejak Juni hingga sekarang, silakan mengajukan

permohonan kepada kami," imbuhnya.

Kepala Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Basuki Hari Saksono mengaku, perwal untuk mengucurkan santunan kematian sudah disampaikan kepada walikota melalui bagian umum. Menurutnya, materi perwal sudah sesuai dengan aturan baru sehingga dapat menjadi acuan.

Mekanisme penyaluran, lanjut Basuki, tidak berubah dengan sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada penerima santunan. Jika sebelumnya santunan kematian berlaku menyeluruh bagi warga ber-

KTP Kota Yogyakarta, kini hanya pemegang KMS saja. "Draf perwal itu sudah kami serahkan sejak Kamis (1/11) lalu. Sebelum ke meja walikota, harus mendapat pencermatan asisten sekda terlebih dahulu," terangnya.

Sementara Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan akan segera menandatangani perwal tersebut jika telah diterima. "Jika sudah sampai ke saya, langsung akan saya tanda tangani. Apalagi APBD Perubahan sudah ditetapkan sehingga pencairannya harus cepat," tandasnya. (M-6)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005